

AKHIR PEKAN KASUS HARIAN CENDERUNG NAIK

## Sultan Minta Masyarakat Taati Prokes

YOGYA (KR) - Kenaikan kasus harian Covid-19 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian sejumlah kalangan, termasuk Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Karena kasus harian Covid-19 yang masih fluktuatif, bahkan cenderung mengalami kenaikan setiap akhir pekan, Sultan meminta masyarakat tidak lengah dan selalu menegakkan Prokes dalam semua aktivitas yang dilakukan. Karena hanya dengan penegakan Prokes penyebaran kasus Covid-19 bisa dicegah.



Sri Sultan HB X

"Memang dalam beberapa hari ini ada kenaikan kasus harian Covid-19 di DIY. Untuk

itu saya mohon masyarakat tetap menggunakan masker dan mentaati Prokes. Jangan meninggalkan masker, karena

ada kecenderungan kalau weekend naik, kan susah," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kamis (3/11).

Sultan mengungkapkan, meski sempat terjadi kenaikan jumlah kasus harian, pihaknya tidak bisa melakukan pengetatan atau melarang kegiatan masyarakat. Karena saat pemerintah sudah melakukan pelanggaran berkaitan dengan kegiatan (aktivitas) di masyarakat. Sehingga jika dilakukan pengetatan maka dapat muncul gejala di masyarakat.

"Kalau saya melarang nanti terjadi gejala tinggi. Tapi faktanya kan saya tiap hari menghitung ditambah ke-

marin ada tambahann 139 kasus harian. Jadi yang bisa dilakukan adalah penegakan Prokes dalam setiap aktivitas yang dilakukan untuk menekan jumlah kasus," terangnya.

Sementara itu saat dimintai komentar soal terkait varian baru Covid-19. Sultan menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi berkaitan dengan varian itu. Namun, seandainya sudah masuk ke DIY, diprediksikan varian baru itu akan lebih lemah jika dibandingkan dengan varian sebelumnya.

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi itu," ujarnya. (Ria)-f

## Gandung Pardiman Bersyukur Pemerintah Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada KGPAA Paku Alam VIII



Gandung Pardiman

YOGYA (KR) - Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah karena akan menganugerahi KGPAA Paku Alam VIII gelar Pahlawan Nasional.

"Alhamdulillah saya bersyukur sekali akhirnya pemerintah akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Sri Paduka Paku Alam VIII," ungkap Gandung Pardiman yang juga Anggota DPR RI dalam siaran pers yang diterima KR, Minggu (6/11).

Gandung Pardiman menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetujui pilihan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah memilih 5 tokoh nasional dan salah satunya adalah KGPAA Paku Alam VIII sebagai Pahlawan Nasional.

"Saya mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang mengangkat Almarhum KGPAA Paku Alam VIII menjadi Pahlawan Nasional. Sebab beliau adalah salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI," tegas Gandung Pardiman.

Gandung menambahkan KGPAA Paku Alam VIII telah memberikan sumbangan pikiran harta dan tenaga untuk kelangsun-

gan kemerdekaan RI pada tahun 1945. Di antaranya Sultan Hamengku Buwono IX dari Kraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan RI sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini.

"Sehari sesudah proklamasi Kemerdekaan itu beliau menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik Indonesia ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946," jelas Gandung.

Gandung menegaskan Sri Paduka Paku Alam VIII juga merupakan sosok yang berjasa ketika tentara NICA berupaya merebut kemerdekaan Indonesia dan pemerintah memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. "Jadi menurut saya, Almarhum Sri Paduka Paku Alam VIII sangat pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional mengingat jasanya yang begitu besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Apalagi beliau juga telah membangun DIY saat menjadi Wakil Gubernur DIY pertama dan juga saat menjadi Gubernur DIY," tandas Gandung.

Gandung menyatakan Partai Golkar selama ini sangat teguh dalam komitmennya menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila serta sangat mendukung dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk KPAA Paku Alam VIII. Bahkan menurut Gandung masih ada nama tokoh-tokoh nasional yang pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara.

"Masih ada beberapa nama tokoh Nasional yang sangat pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional," pungkas Gandung Pardiman. (Dev)-f

## Roadmap Pengadaan Barang dan Jasa DLHK Antisipasi Perubahan Iklim

YOGYA (KR) - Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) 2023-2026, perubahan iklim/climate change telah menjadi isu strategis pertama yang coba dipecahkan. Dengan landasan Hamemayu Hayuning Bawana, harapannya DIY bisa memberikan sumbangsih dalam menangani permasalahan global tersebut.



Tim Penyusun Roadmap PBJ Berkelanjutan menyampaikan materi.

Hotel Santika Yogyakarta

Di depan tamu undangan dari instansi terkait disebutkan pengoptimalan penggunaan produk ramah lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa. DIY diharapkan menjadi percontohan atau teladan dalam mewujudkan

kan keindahan, kenyamanan, dan ketentraman dunia," tegasnya.

Karenanya penyusunan Roadmap ini bisa menjadi dasar strategi Implementasi PBJ Berkelanjutan di DIY. "Memotret kondisi awal dan kondisi tujuan akhir, menjadi petunjuk dan langkah-langkah nyata menuju penerapan, meningkatkan kesadaran personal pengadaan di seluruh organisasi Pemerintah DIY, menjelaskan

peran masing-masing pihak terkait implementasi PBJ Berkelanjutan di DIY," jelasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Kadin DIY, GKR Mangkubumi yang hadir mengatakan, Kadin sebagai ruang pembinaan, komunikasi, konsultasi dan advokasi bagi para pengusaha Indonesia serta pemerintah mendukung Roadmap PBJ berkelanjutan. "Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup," tegasnya

Nanang menambahkan PBJ Berkelanjutan dengan harapan tercapai beberapa sasaran/outcome, diantaranya mendorong peningkatan penggunaan produk ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon dengan penggunaan produk-produk ramah lingkungan/produk bersertifikasi dalam penerapan PBJ di lingkungan pemerintah DIY. "Memberikan kontribusi penanganan perubahan iklim, mendorong pemberdayaan usaha kecil dan komunitas/usaha lokal," jelasnya. (Vin)-f

## MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

BADAN MUSYAWARAH  
JADI PEDOMAN ALAT KELENGKAPAN

### Pegang Kendali Seluruh Agenda Permusyawaratan

H Danang Rudyatmoko

HM Fursan SE

Dhian Novitasari SPd

YOGYA (KR) - Tugas dan fungsi anggota dewan selama lima tahun masa jabatannya tidak bisa dilepaskan dari rencana kerja yang disusun secara matang. Rencana tersebut selanjutnya dijabarkan dalam agenda tahunan serta diperinci menjadi tugas harian selama sebulan. Sinkronisasi dan harmonisasi seluruh agenda permusyawaratan itu pun berada di bawah kendali Badan Musyawarah.

Sebagai salah satu alat kelengkapan dewan, Badan Musyawarah bahkan menjadi pedoman bagi alat kelengkapan lain. Terutama dalam menjalankan setiap kegiatan agar terjadwal dengan baik dan tidak saling tumpang tindih. Tujuannya agar seluruh target yang telah ditetapkan di tiap alat kelengkapan mampu tercapai secara optimal.

Di DPRD Kota Yogyakarta, Badan Musyawarah beranggotakan 20 orang

termasuk tiga orang pimpinan yang merangkap anggota. Jumlah anggota tersebut merupakan separuh dari total anggota DPRD Kota Yogyakarta. Sesuai dalam tata tertib, Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan Pimpinan Badan Musyawarah yang merangkap anggota. Ketiganya ialah H Danang Rudyatmoko sebagai Ketua, HM Fursan SE sebagai Wakil Ketua I, dan Dhian Novitasari SPd sebagai Wakil Ketua II.

"Seluruh agenda yang akan dijalankan oleh alat kelengkapan, fraksi maupun panitia khusus, harus terkoordinasikan dengan Badan Musyawarah. Sehingga dalam membahas setiap persoalan harus disinergikan dengan Badan Musyawarah," tandas Danang Rudyatmoko.

Tugas dan wewenang Badan Musyawarah juga telah dirinci dalam tata tertib dewan. Selain mengko-

ordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan dari seluruh alat kelengkapan, agenda DPRD dalam satu tahun masa sidang juga ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Begitu pula perkiraan waktu penyelesaian setiap masalah serta jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah. Khusus waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah sudah ditetapkan maksimal tiga bulan setelah panitia khusus dibentuk. Tenggat waktu itu telah disepakati bersama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang memiliki kewenangan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dalam satu tahun masa sidang.

Keputusan Badan Musyawarah bahkan bersifat mengikat. Hal ini karena perubahan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat dilakukan melalui rapat paripurna.

"Setiap fraksi memiliki wakil di Badan Musyawarah. Sehingga sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah, setiap anggota selalu berkonsultasi dengan fraksi terlebih dahulu," imbuh Danang.

Dhian Novitasari menambahkan, permusyawaratan merupakan model yang

melekat dalam ketugasan dewan. Pasalnya, dalam permusyawaratan tersebut terjadi pertukaran pendapat dari berbagai pihak terhadap suatu permasalahan guna diputuskan kebijakan terbaik sesuai kemaslahatan bersama dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pihaknya dalam menyusun agenda permusyawaratan juga mempertimbangkan banyak hal. Terhadap kegiatan yang dijalankan, Badan Musyawarah melakukan kroscek secara berkala mengenai capaian kinerja.

"Kita saling koordinasi. Baik dengan alat kelengkapan lain maupun unsur yang ada di kesekretariatan mulai bagian perundangan, persidangan, umum, keuangan dan lainnya. Sehingga kalau ada persoalan yang bisa berdampak pada agenda lain, bisa segera dicarikan solusinya," paparnya.

HM Fursan juga meng-

ungkapkan hal sama. Kunci utama agar semua agenda tidak meleset dari jadwal ialah komitmen untuk saling berkoordinasi. Seperti memasuki akhir tahun masa sidang pada tahun ini pihaknya turut mengawal capaian kinerja dan program dari masing-masing alat kelengkapan. Salah satunya realisasi pembahasan rancangan peraturan daerah yang dipastikan tuntas 100 persen. Hasil dari kinerja itu pun akan mempengaruhi rencana kerja legislasi pada tahun selanjutnya.

"Sebenarnya itu hanya salah satu fungsi yang memang Badan Musyawarah menjadi leading sektor bagi alat kelengkapan lain. Tetapi jika ada persoalan mendesak yang butuh penyelesaian secara terbuka, Badan Musyawarah yang menentukan atau merekomendasikan perlu tidaknya dibentuk panitia khusus," tandasnya. (Dhi)-f

KR-Ardhi Wahdan

Salah satu permusyawaratan di DPRD Kota Yogyakarta.

KR-Ardhi Wahdan

H Danang Rudyatmoko menerima audiensi dari warga untuk mencari pemufakatan.

KR-Ardhi Wahdan

Koordinasi rutin jajaran pimpinan Badan Musyawarah.